

## IMPLEMENTASI ASPEK MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Rima Diaty<sup>1</sup>, Azura Arisa<sup>2</sup>, Nur Cahyani Ari Lestari<sup>3</sup>, Ngalimun<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Persada Banjarmasin<sup>1,2,3</sup>

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin<sup>4</sup>

Email: [Rimadiaty792@gmail.com](mailto:Rimadiaty792@gmail.com), [azura.syakura@gmail.com](mailto:azura.syakura@gmail.com), [nurcahyaniarilestari@gmail.com](mailto:nurcahyaniarilestari@gmail.com), [ngalimun@umbjm.ac.id](mailto:ngalimun@umbjm.ac.id)

### ABSTRAK

Dalam penelitian ini membahas implementasi aspek manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling yang terjadi di sekolah. Adapun hasilnya adalah: manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah termasuk madrasah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bimbingan konseling di sekolah pelaksanaannya memerlukan kerja sama dan partisipasi *stakeholders* sekolah. Seperti kelompok *stakeholders* adalah kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, siswa, konselor, wakil pemerintah dan wakil organisasi pendidikan. Dengan demikian, penyusunan program BK di sekolah pelaksanaannya mensyaratkan kerja sama dan partisipasi *stakeholders* dan penyusunan program BK pelaksanaannya juga meniscayakan adanya keterbukaan. **Kata Kunci:** *Implementasi, manajemen berbasis sekolah, pelayanan bimbingan konseling.*

---

## IMPLEMENTATION OF SCHOOL-BASED MANAGEMENT ASPECTS IN GUIDANCE AND COUNSELING SERVICES

### ABSTRACT

This study discusses the implementation of aspects of school-based management in counseling guidance services that occur in schools. The results are: school-based management in counseling guidance services is a management model that provides wider autonomy to schools including madrasahs to manage school resources and encourage schools to increase the participation of school members and the community to achieve school goals within the framework of national education. The implementation of school-based management in counseling guidance in schools requires the cooperation and participation of school stakeholders. Such stakeholder groups are principals and their representatives, teachers, students, counselors, government representatives and representatives of educational organizations. Thus, the preparation of the BK program in schools requires the cooperation and participation of stakeholders and the preparation of the BK program in its implementation also requires openness.

**Keywords:** *Implementation, school-based management, counseling guidance services.*

## PENDAHULUAN

Sebagai dasar perumusan makna manajemen pelayanan BK, terlebih dahulu dikemukakan makna manajemen secara umum. Banyak sekali pengertian manajemen dan satu pengertian tentang manajemen tidak bisa mewakili pengertian lain secara universal. Menurut Hendrayani & Triyasa (2021) tidak ada definisi manajemen yang telah diterima secara universal. Hal ini berarti pengertian manajemen sangat kontekstual. Mary Parker Follet yang dikutip oleh Susan (2019) menyatakan bahwa “manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.” Pengertian ini mengandung arti bahwa para manajer atau pimpinan seperti kepala sekolah dan madrasah mencapai tujuan-tujuan organisasi (sekolah dan madrasah) melalui pengaturan orang-orang lain (guru-guru dan petugas administrasi) untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.

Sesungguhnya pengertian manajemen cukup luas sehingga tidak ada pengertian yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Pengertian manajemen yang lebih kompleks dikemukakan oleh Stoner dalam Marlina (2013) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari berbagai pengertian, Nazharriya (2017) menyimpulkan bahwa manajemen adalah: bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi

perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*con trolling*).

Pelayanan bimbingan dan konseling meniscayakan manajemen agar tercapai efisiensi dan efektivitas serta tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, setidaknya ada tiga alasan mengapa manajemen itu diperlukan kan termasuk dalam dunia pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu: *Pertama*, untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebagai bukti bahwa proses manajemen pelayanan bimbingan konseling tepat sasaran dan sesuai tujuan. *Kedua*, untuk menjaga kesinambungan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan (apabila ada).

Manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, saran-sasaran dan kegiatan-kegiatan apabila ada yang saling bertentangan dari pihak-pihak tertentu seperti kepala sekolah dan madrasah, para guru, tenaga administrasi, para siswa, orang tua siswa, komite sekolah dan madrasah, dan pihak-pihak lainnya. *Ketiga* untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau merupakan perhitungan rasio antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah dan madrasah yang efektif atau koordinator layanan BK yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan sekolah dan madrasah atau tujuan layanan BK. Menurut Peter Drucker dalam Mesterjon & Kom (2021), efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan

efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing the right*)

## **KAJIAN TEORI**

### **Prinsip Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling**

Secara umum seperti telah disebutkan di atas, prinsip-prinsip manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Prinsip-prinsip manajemen di atas apabila diterapkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan bagaimana pelayanan bimbingan dan konseling direncanakan dan diorganisasi? Bagaimana menyusun personalia (orang-orang yang terlibat dalam pelayanan bimbingan dan konseling?), bagaimana mengarahkan dan memimpin proses pelayanan BK? dan bagaimana mengawasi atau mengevaluasi pelayanan bimbingan dan konseling? Penerapan prinsip-prinsip manajemen di atas secara terintegrasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling akan berkenaan dengan bagaimana secara umum pelayanan bimbingan dan konseling itu dikelola.

*Pertama*, perencanaan (*planning*). Perencanaan dalam pelayanan bimbingan dan konseling akan sangat menentukan proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai suatu proses kegiatan, membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis dari mulai penyusunan program hingga pelaksanaannya. Agar pelayanan bimbingan dan konseling memperoleh hasil sesuai tujuan yang telah dirumuskan, maka harus dilakukan perencanaan. Di sekolah dan madrasah

fungsi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah, koordinator BK (apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki banyak tenaga atau petugas bimbingan dan konseling) dan guru BK.

*Kedua*, pengorganisasian (*organizing*). Pengorganisasian dalam pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan bagaimana pelayanan bimbingan dan konseling dikelola dan diorganisasi. Pengelolaan dan pengorganisasian pelayanan bimbingan dan konseling berkaitan dengan model atau pola yang dianut oleh suatu sekolah dan madrasah. Apabila sekolah dan madrasah menganut pola profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling, akan berbeda sistem pengorganisasiannya dengan sekolah dan madrasah yang menganut pola nonprofesional. Sistem pengorganisasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah tertentu bisa diketahui dari struktur organisasi sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Dari struktur organisasi tersebut juga bisa diketahui pola dan model apa yang digunakan oleh sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan hanya memiliki satu orang guru pembimbing, maka model organisasi pelayanan BK terintegrasi dengan organisasi sekolah dan madrasah secara umum. Tetapi apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki banyak tenaga bimbingan, maka harus disusun organisasi pelayanan BK tersendiri yang terdiri atas koordinator, anggota, dan staf administrasi pelayanan BK. Fungsi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan koordinator layanan BK (apabila sekolah dan madrasah memiliki banyak petugas bimbingan).

*Ketiga*, penyusunan personalia (*staffing*). Prinsip ini dalam pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan bagaimana para

personalia atau orang-orang yang terlibat dalam aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling ditetapkan, disusun dan diadakan pembagian tugas (*job discription*) sebagaimana telah disebutkan dalam penyusunan program BK di atas. Guru pembimbing atau konselor sekolah tidak mungkin bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan BK kepada siswa di sekolah dan madrasah. Guru BK akan memerlukan orang lain dalam memberikan pelayanan BK. Dengan perkataan lain, pelayanan BK di sekolah dan madrasah melibatkan banyak orang. Untuk itu, harus ditentukan dan disusun para personalia atau orang-orang yang terlibat dalam layanannya agar pelaksanaannya efektif dan efisien sehingga tujuannya pun dapat dicapai secara efektif dan efisien pula. Fungsi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan madrasah bersama koordinator layanan BK, terutama apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki beberapa orang guru BK.

*Keempat*, pengarahan dan kepemimpinan (*leading*). Prinsip ini berkenaan dengan bagaimana mengarahkan dan memimpin para personalia layanan bimbingan dan konseling, sehingga mereka bekerja sesuai dengan job atau bidang tugasnya masing-masing. Pengarahan dan kepemimpinan diperlukan agar aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan madrasah terutama apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan hanya memiliki satu orang guru BK. Apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki beberapa orang guru BK harus ditunjuk salah seorang sebagai koordinator dan yang lain sebagai anggota (*staf*). Selanjutnya koordinatorlah yang melaksanakan fungsi

pengarahan dan kepemimpinan. Secara umum fungsi ini di sekolah dan madrasah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan madrasah.

*Kelima*, pengawasan (*controlling*). Prinsip ini dalam pelayanan konseling berkenaan dengan bagaimana melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan bimbingan dan konseling mulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaannya. Pengawasan penting dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Implementasi program dalam bentuk aktivitas-aktivitas layanan BK pun perlu pengawasan dan penilaian atau evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya dan dapat diketahui pencapaian hasil-hasilnya. Fungsi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan madrasah apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan hanya memiliki satu orang guru BK. Tetapi apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki beberapa orang guru BK, fungsi ini dilaksanakan oleh koordinator layanan BK sekaligus juga kepala sekolah dan madrasah.

### **Pola Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling**

Sekolah dan madrasah merupakan suatu lembaga sosial. Selain itu, sekolah dan madrasah juga merupakan suatu unit kerja. Sebagai suatu unit kerja, sekolah dan madrasah dikelola atau diorganisasi menurut pola-pola atau kerangka hubungan struktural tertentu. Yang dimaksud pola manajemen pelayanan bimbingan dan konseling adalah kerangka hubungan struktural antara berbagai bidang atau berbagai kedudukan dalam pelayanan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah. Kerangka hubungan tersebut digambarkan dalam suatu struktur organisasi

pelayanan bimbingan dan konseling. Seperti telah disebut di muka, sekolah dan madrasah yang menganut pola profesional, akan berbeda struktur organisasinya dari pada sekolah dan madrasah yang menganut pola nonprofesional. Yang dimaksud pola profesional di sini adalah guru pembimbing di sekolah dan madrasah yang bersangkutan direkrut dari alumni BK baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3). Sedangkan, pola nonprofesional adalah guru pembimbing direkrut bukan dari alumni BK. Pola nonprofesional biasanya menempatkan kepala sekolah atau madrasah, guru mata pelajaran tertentu, atau wali kelas sebagai petugas bimbingan.

Apabila sekolah dan madrasah menempatkan kepala sekolah atau madrasah sebagai guru pembimbing, maka pola manajemen atau struktur organisasi layanan BK; di sekolah dan madrasah yang bersangkutan akan berbeda dengan sekolah dan madrasah yang memiliki guru pembimbing tersendiri. Akan berbeda lagi apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki beberapa orang guru BK.

## **METODOLOGI**

Sebuah penelitian berupaya untuk memperoleh informasi yang lengkap dan begitu akurat, salah satunya mengenai adanya pengaruh yang signifikan dari kegiatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling. Dalam hal ini peneliti tidak memanipulasi variabel yang ada. Peneliti hanya mengukur variabel yang ada, maka dengan begitu penelitian ini tergolong penelitian deskriptif. (Juliandi & Manurung, 2014).

Didalam penelitian yang menerapkan analisis regresi, tidak jarang melibatkan lebih dari satu variabel dalam model regresinya, karena dengan hanya

menggunakan satu variabel bebas saja untuk menduga variabel tak bebas sering kali kurang realistis, karenanya diperlukan model regresi berganda.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi walaupun didalamnya ada variabel dependen (variabel tidak bebas, tergantung atau terikat) dan ada variabel independen (variabel bebas, regresor atau prediktor) namun di dalam analisisnya tidak serta merta menyatakan kausalitas. Kendall Stuart mengatakan bahwa hubungan statistika hanya menunjukkan apakah ada atau tidak ada, dan bila ada bersifat kuat atau lemah, dan tidak dapat menunjukkan hubungan kausalitas (Latifah & Handayani, 2022). Hubungan kausalitas harus berasal dari luar statistika yaitu dari landasan teori dan konsep.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelayanan Bimbingan dan Konseling**

Sebagai penanggung jawab utama pelayanan bimbingan dan konseling, koordinator memegang administrasi bimbingan, yaitu mengatur kerja sama tenaga-tenaga bimbingan dan mengarahkan semua aktivitas atau kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Koordinator bersama dengan anggota-anggota staf bimbingan yang lain membentuk suatu tim kerja yang secara bersama mengusahakan pelayanan bimbingan di sekolah atau madrasah seoptimal mungkin.

Sebagai pimpinan staf bimbingan, koordinator harus memenuhi tuntutan pendidikan akademik dan harus mampu menciptakan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan bimbingan.

Selain dalam berkomunikasi dengan anggota-anggota staf bimbingan, koordinator harus menunjukkan sikap menghargai dan menghormati profesionalitas rekan-rekannya serta memberikan kebebasan yang wajar kepada para tenaga bimbingan dalam menunaikan tugasnya.

Dalam mengadministrasi orang yang bekerja sebagai anggota staf bimbingan di sekolah dan madrasah, koordinator harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah dan madrasah yang bersangkutan; khususnya yang menyangkut: pengangkatan, pemberhentian, penggajian, kenaikan pangkat, kesempatan mengikuti pendidikan tambahan atau penataran, tugas di luar sekolah atau madrasah dan sebagainya. Dalam hal di atas, koordinator bimbingan tidak diberi wewenang bertindak sendiri tanpa melalui saluran-saluran administratif yang mengikat semua tenaga kependidikan termasuk dirinya sendiri di sekolah atau madrasah yang bersangkutan.

Pembagian tugas di antara para anggota staf bimbingan, sesuai dengan jabatannya masing-masing menjadi tanggung jawab koordinator. Bagaimana sebaiknya pembagian tugas itu, sangat tergantung dari pola dasar pelaksanaan bimbingan, jumlah jabatan yang bersifat merangkap atau tidak, taraf keahlian tenaga bimbingan, dan jenis spesialisasi yang dimiliki oleh tenaga bimbingan. Selain itu, koordinator juga bertugas mengatur sarana personil dengan sebaik-baiknya.

Ada lima kemungkinan mengatur pembagian tugas antara para tenaga bimbingan di sekolah atau madrasah, khususnya di sekolah menengah, yaitu:

1. Pembimbing laki-laki melayani siswa laki-laki dan pembimbing perempuan melayani siswa perempuan.

2. Setiap pembimbing diberi tanggung jawab terhadap tingkatan kelas tertentu, sehingga pembimbing setiap tahun pembelajaran memperoleh angkatan siswa yang baru.
3. Setiap pembimbing diberi tanggung jawab terhadap angkatan siswa tertentu yang diikutinya terus dari saat angkatan itu masuk sekolah sampai tamat.
4. Setiap pembimbing memegang layanan-layanan bimbingan tertentu untuk seluruh angkatan siswa, misalnya pembimbing A khusus melayani semua siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, pembimbing B khusus melayani semua siswa yang akan langsung bekerja setelah tamat, dan pembimbing C menangani program testing untuk semua siswa, dan lain sebagainya.
5. Kombinasi antara poin 2 dan 4 sehingga ada beberapa pembimbing yang melayani siswa ditingkat kelas tertentu dan ada beberapa pembimbing yang memegang aspek-aspek program bimbingan tertentu.

Selain tugas-tugas di atas, koordinator bimbingan juga bertugas mengatur hubungan kerja sama di antara para tenaga bimbingan dengan tenaga pembantu administratif atau tata usaha. Dalam mengadministrasikan kegiatan-kegiatan bimbingan, sebaiknya dibedakan antara kegiatan yang menyangkut;

1. Kegiatan profesional intern di antara anggota staf bimbingan,
2. Kegiatan membina hubungan dengan masyarakat, instansi pendidikan lain, atau tenaga penunjang di luar sekolah atau madrasah yang bersangkutan,
3. Kegiatan yang berupa penulisan laporan yang harus dikerjakan oleh masing-masing tenaga bimbingan,

4. Kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pembantu administratif,
5. Kegiatan profesional ekstern yang berupa implementasi dari pelayanan bimbingan yang diberikan kepada orang lain.

#### **Implementasi Aspek Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling**

##### **1. Makna dan Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah**

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dewasa ini telah dikenal luas terutama oleh masyarakat sekolah dan madrasah. Bahkan di sekolah dan madrasah tertentu telah secara konsisten menerapkan MBS dalam pengelolaan program pendidikan atau program sekolah dan madrasah. Apabila sekolah dan madrasah telah menerapkan MBS dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran, berarti secara implisit telah menerapkan MBS dalam pelayanan bimbingan dan konseling

MBS merupakan salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan (Malik Fajar, 2002). MBS adalah pengelolaan sekolah termasuk madrasah yang menggambarkan kumpulan praktik-praktik dari banyak orang pada tingkat sekolah dan madrasah guna membuat keputusan untuk sekolah dan madrasah. MBS dimulai dari desentralisasi dengan pemberian wewenang yang jelas dari pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah dan madrasah dalam berbagai hal.

MBS adalah pengoordinasian dan penyelarasan sumber daya yang dilakukan secara otonomis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok *stakeholders* dalam pengambilan keputusan yang partisipatif. Yang termasuk kelompok *stakeholders* meliputi: kepala sekolah atau madrasah dan wakil-wakilnya, guru, siswa, konselor (pembimbing), wakil pemerintah dan wakil organisasi pendidikan (Azim, 2010). Menurut Mulyasa (2022) MBS adalah penataan sistem pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada warga sekolah untuk memanfaatkan semua fasilitas dan media yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa, dan mampu mempertanggungjawabkannya secara penuh.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa MBS merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah termasuk madrasah untuk mengelola sumber daya sekolah dan madrasah, serta mendorong sekolah dan madrasah meningkatkan partisipasi warga sekolah atau madrasah dan masyarakat untuk mencapai tujuan sekolah dan madrasah dalam kerangka pendidikan nasional.

MBS dengan konsepsi di atas, menurut Hakim (2016) bertujuan antara lain untuk: (a) Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerja sama,

akuntabilitas, inisiatif sekolah dan madrasah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. (b) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan madrasah bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, duduk bersama untuk pengambilan keputusan. (c) Meningkatkan tanggung jawab sekolah dan madrasah kepada *stakeholders* terutama kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.

#### **Implementasi Aspek-aspek Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pelayanan Bimbingan Konseling**

Berdasarkan makna MBS di atas, ada beberapa aspek yang menjadi ciri khas MBS, yaitu: (a) melibatkan semua kelompok *stakeholders* dalam penyusunan program sekolah dan pengambilan keputusan, (b) pengambilan keputusan secara kolektif, (c) partisipasi atau kerja sama antara *stakeholders* dalam penyusunan dan penyelenggaraan program.

MBS meniscayakan kerja sama, partisipasi, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pembelajaran. Ketiga aspek ini bisa diimplementasikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Artinya penyusunan dan penyelenggaraan program pelayanan BK di sekolah dan madrasah juga mensyaratkan adanya kerja sama, partisipasi, dan keterbukaan.

Penyusunan program bimbingan dan konseling dan pelaksanaannya tidak mungkin bisa dilakukan sendiri oleh kepala sekolah atau

oleh petugas bimbingan sekolah dan madrasah. Penyusunan program BK dan pelaksanaannya akan melibatkan berbagai pihak yang terkait di sekolah atau madrasah. Berbagai pihak yang terkait itulah yang dalam MBS disebut *stakeholders*. Ini artinya penyusunan program BK di sekolah atau madrasah dan pelaksanaannya memerlukan kerja sama dan partisipasi *stakeholders* sekolah dan madrasah. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa yang termasuk kelompok *stakeholders* adalah kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, siswa, konselor, wakil pemerintah dan wakil organisasi pendidikan. Dengan demikian, penyusunan program BK di sekolah dan madrasah serta pelaksanaannya mensyaratkan kerja sama dan partisipasi *stakeholders* yang telah disebutkan di atas. Penyusunan program BK dan pelaksanaannya juga meniscayakan adanya keterbukaan. Keniscayaan ini relevan dengan asas layanan bimbingan itu sendiri yang salah satunya adalah keterbukaan.

Penyusunan program BK di sekolah dan madrasah dan pelaksanaannya yang melibatkan *stakeholders* sekolah dan madrasah, diharapkan dapat mencapai peningkatan multi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang bersangkutan.

#### **KESIMPULAN**

Manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan konseling merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah termasuk madrasah untuk mengelola sumber daya

sekolah dan madrasah, serta mendorong sekolah dan madrasah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan sekolah dan madrasah dalam kerangka pendidikan nasional.

Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam bimbingan konseling di sekolah pelaksanaannya memerlukan kerja sama dan partisipasi *stakeholders* sekolah dan madrasah. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa yang termasuk kelompok *stakeholders* adalah kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, siswa, konselor, wakil pemerintah dan wakil organisasi pendidikan. Dengan demikian, penyusunan program BK di sekolah dan madrasah serta pelaksanaannya mensyaratkan kerja sama dan partisipasi *stakeholders* yang telah disebutkan di atas. Penyusunan program BK dan pelaksanaannya juga meniscayakan adanya keterbukaan. Keniscayaan ini relevan dengan asas layanan bimbingan itu sendiri yang salah satunya adalah keterbukaan.

## REFERENSI

- Azim, A. (2010). *Manajemen komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri 2 Medan*. Pascasarjana UIN-SU.
- Hakim, M. N. (2016). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Mewujudkan Sekolah Islam Unggulan. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 104–114.
- Hendrayani, E., & Triyasa, A. (2021). *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*. Insan Cendekia Mandiri.
- Juliandi, A., & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. Umsu Press.
- Latifah, L., & Handayani, N. F. (2022). Kontribusi Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Dan Kepuasan Kerja Terhadap Pelaksanaan Kinerja Guru Di SD Muhammadiyah Martapura. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 18–32.
- Marlina, L. (2013). Tipe-tipe kepemimpinan dalam manajemen pendidikan. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(02), 215–227.
- Mesterjon, S., & Kom, M. (2021). *Teori Dan Konsep Manajemen Sistem Pembelajaran 4.0*. Deepublish.
- Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.
- Nazharriya, A. D. S. (2017). Deskripsi Manajemen Ekstrakurikuler Bola Basket Peraih Babak Fantastic Four Pada Kejuaraan Junio Jrbl Surabaya Series 2016. *Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan*, 5(3).
- Susan, E. (2019). Manajemen sumber daya manusia. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 952–962.